

**PERANCANGAN DIGITALISASI DESA PALLANTIKANG
KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO
BERBASIS *BUSINESS PROCESS MANAGEMENT***



OLEH:

ST. MUSTIKA. B. M

H071201083



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024

**PERANCANGAN DIGITALISASI DESA PALLANTIKANG
KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO
BERBASIS *BUSINESS PROCESS MANAGEMENT***

**ST. MUSTIKA. B. M
H071201083**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**

**PERANCANGAN DIGITALISASI DESA PALLANTIKANG
KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO
*BERBASIS BUSINESS PROCESS MANAGEMENT***

ST. MUSTIKA. B. M
H071201083

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Sistem Informasi

Pada

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**

SKRIPSI

**PERANCANGAN DIGITALISASI DESA PALLANTIKANG KECAMATAN
BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO BERBASIS BUSINESS
PROCESS MANAGEMENT**

ST. MUSTIKA. B.M
H071201083

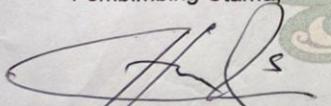
Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Sistem Informasi
Pada 08 Oktober 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

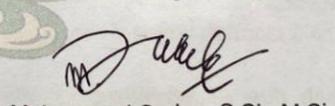
Pada

UNIVERSITAS HASANUDDIN
Program Studi Sistem Informasi
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

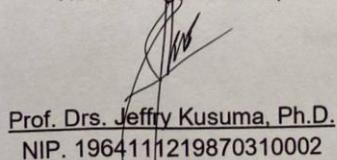
Mengesahkan:
Pembimbing Utama,


Dr. Muhammad Hasbin, M.Sc
NIP. 19607201989031003

Mengesahkan
Pembimbing Pertama,


Muhammad Sadno, S.Si., M.Si.
NIP. 199008162022043001

Mengetahui
Ketua Program Studi,


Prof. Drs. Jeffry Kusuma, Ph.D.
NIP. 1964111219870310002



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "PERANCANGAN DIGITALISASI DESA PALLANTIKANG KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO BERBASIS BUSINESS PROCESS MANAGEMENT" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Dr. Muhammad Hasbi, M.Sc sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Sadno, S.Si., M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.



Makassar, 08 - October - 2024

ST. MUSTIKA. B. M
H071201083



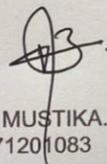
UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul skripsi yaitu "Perancangan Digitalisasi Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Berbasis *Business Process Management*". Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) pada Program Sarjana Komputer di Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW, yang telah membawa umat manusia dari masa kegelapan menuju era yang penuh cahaya dan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material, telah menjadi faktor penting. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus. Ucapan ini terutama ditujukan kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam beserta Wakil Dekan dan seluruh jajaran staf, Ketua Departemen Matematika, Ketua Program Studi Sistem Informasi, serta Dosen Pembimbing yang dengan setia memberikan bimbingan dan arahan selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada Dosen Penguji atas segala masukan dan saran yang diberikan selama proses penulisan. Ucapan terima kasih yang mendalam juga disampaikan kepada Kepala Desa Pallantikang beserta staff-staff Desa Pallantikang, serta kepada seluruh Dosen Program Studi Sistem Informasi yang telah mendidik dan berbagi ilmu dengan penulis selama masa perkuliahan. Terakhir, terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua saya Bapak Bustam Dan Ibu Sitti Nurjiah, S.E, atas segala perjuangan, dukungan, dan doa yang setiap saatnya dilantikkan dengan tulus, serta kepada seluruh sahabat kuliah penulis yaitu Sarvina, Dhian, Fauziah dan seluruh teman-teman Sistem Informasi 2020 yang senantiasa memberikan dukungan selama 4 tahun ini.

Akhir kata Penulis juga menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritikan dari pembaca agar dapat lebih membangun penulis kedepannya. Penulis juga berharap lebih semoga skripsi ini dapat berguna di masa yang akan datang dan dapat membantu orang banyak.

Makassar, 08 Oktober 2024



ST. MUSTIKA. B. M
H071201083

ABSTRAK

ST. MUSTIKA. B. M. **Perancangan Digitalisasi Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Berbasis *Business Process Management*.**

(dibimbing oleh Bapak. Dr. Muhammad Hasbi, M.Sc., dan Muhammad Sadno, S.Si., M.Si).

Desa Pallantikang, yang terletak di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, memiliki potensi yang besar di bidang pertanian dan perkebunan, yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat setempat. Namun, seperti banyak desa di Indonesia, Pallantikang menghadapi tantangan dalam administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya. Meskipun memiliki potensi besar, desa ini masih terhambat oleh proses administrasi yang manual dan kurang efisien, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan, kurangnya transparansi, dan sulitnya akses informasi bagi masyarakat. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi penghalang utama dalam upaya modernisasi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan digital di Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dan merancang sistem digitalisasi desa berbasis *Business Process Management* (BPM) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Data kualitatif yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul, yang kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang sesuai guna mendukung perkembangan desa. Berdasarkan hasil analisis, tingkat kesiapan digitalisasi Desa Pallantikang tercatat pada angka 2,42, yang menempatkannya pada level 2 menurut *Digital Village Index* (DVI), yaitu "Connected". Untuk mengatasi tantangan tersebut, penulis mengusulkan pengembangan model *Business Process Management* (BPM) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifik desa. Model ini dirancang untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan daya saing desa dengan mengoptimalkan proses bisnis yang ada. Dengan penerapan model ini, diharapkan Desa Pallantikang dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital dengan lebih baik.

Kata kunci: Desa Pallantikang; *Business Process Management* (BPM); *Digital Village Index* (DVI) dan Kesiapan Digitalisasi.

ABSTRACT

ST. MUSTIKA. B. M. Digitalization Design of Pallantikang Village, Bangkala District, Jeneponto Regency Based on Business Process Management.

(supervised by Dr. Muhammad Hasbi, M.Sc., and Muhammad Sadno, S.Si., M.Si).

Pallantikang Village, located in Bangkala District, Jeneponto Regency, South Sulawesi, has great potential in agriculture and plantations, which are the main sources of livelihood for the local community. However, like many villages in Indonesia, Pallantikang faces challenges in government administration, public services, and resource management. Despite its great potential, the village is still hampered by manual and inefficient administrative processes, resulting in delays in services, lack of transparency, and difficulty in accessing information for the community. In addition, limited technological infrastructure is a major barrier to village modernization efforts. This study aims to measure the level of digital maturity in Pallantikang Village, Bangkala District, Jeneponto Regency, and to design a village digitalization system based on Business Process Management (BPM) to improve service efficiency and effectiveness. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and document analysis. The qualitative data collected will be analyzed systematically to identify emerging patterns, themes, and meanings, which are then used to formulate appropriate recommendations to support village development. Based on the analysis results, the level of digitalization readiness of Pallantikang Village was recorded at 2.42, which places it at level 2 according to the Digital Village Index (DVI), namely "Connected". Conclusion. To overcome these challenges, the author proposes the development of a Business Process Management (BPM) model that is tailored to the specific needs and goals of the village. This model is designed to improve village performance, efficiency, and competitiveness by optimizing existing business processes. With the implementation of this model, it is hoped that Pallantikang Village can face challenges and take advantage of opportunities in the digital era better.

Keywords: Pallantikang Village; Business Process Management (BPM); Digital Village Index (DVI) and Digitalization Readiness.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGAJUAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | i |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 2 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 2 |
| 1.4 Batasan Masalah..... | 2 |
| 1.5 Landasan Teori..... | 3 |
| 1.5.1 Digitalisasi Desa | 3 |
| 1.5.2 Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala..... | 3 |
| 1.5.3 <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) | 5 |
| 1.5.4 Desa Digital | 7 |
| 1.5.5 <i>Digital Village Index</i> (DVI)..... | 8 |
| 1.5.6 Lingkungan Sistem Informasi | 11 |
| 1.5.7 <i>Business Process Management</i> (BPM)..... | 12 |
| BAB II METODE PENELITIAN..... | 15 |
| 2.1 Pendekatan Penelitian | 15 |
| 2.2 <i>Design Science</i> Penelitian..... | 15 |
| 2.3 Tempat dan Waktu Penelitian..... | 16 |
| 2.4 Diagram Alur Penelitian | 17 |
| 2.5 Instrumen Penelitian..... | 18 |
| 2.5.1 Indikator..... | 18 |
| 2.5.2 Tingkat Pengukuran | 19 |

| | | |
|------------------------------------|--|----|
| 2.5.3 | <i>Tools Bussines Process Management (BPM)</i> | 20 |
| 2.6 | Informan Penelitian | 20 |
| 2.7 | Teknik Pengumpulan Data | 20 |
| 2.7.1 | Studi Literatur | 21 |
| 2.7.2 | Penelitian Lapangan..... | 21 |
| 2.8 | Olah dan analisis data..... | 21 |
| 2.8.1 | Transkrip wawancara | 21 |
| 2.8.2 | <i>Coding</i> | 21 |
| 2.8.3 | Triangulasi..... | 22 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN | | 23 |
| 3.1 | Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 23 |
| 3.1.1 | Hasil Observasi | 24 |
| 3.1.2 | Hasil Wawancara..... | 24 |
| 3.2 | Informasi Informan | 24 |
| 3.3 | Paparan Transkrip Wawancara | 24 |
| 3.4 | Hasil Penelitian Indikator Digital <i>Village Index (DVI)</i> | 36 |
| 3.5 | Triangulasi Interpretasi Data | 38 |
| 3.6 | Usulan <i>Business Process Business (BPM)</i> Yang Baru Persuratan | 40 |
| 3.7 | Use Case Diagram Persuratan | 43 |
| BAB IV KESIMPULAN | | 45 |
| 4.1 | Kesimpulan | 45 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 46 |
| LAMPIRAN..... | | 48 |

DAFTAR TABEL

| Nomor urut | Halaman |
|---|---------|
| 1. Indikator digitalisasi desa..... | 8 |
| 2. Waktu penelitian | 16 |
| 3. <i>Meansurement Level</i> | 19 |
| 4. Ketersediaan tim digitalisasi | 25 |
| 5. Proses pelayanan dan ketersediaan operator | 26 |
| 6. Privasi dan keamanan data | 27 |
| 7. Program pelatihan kewirausahaan | 28 |
| 8. Peluang bisnis masyarakat..... | 29 |
| 9. Pengaruh teknologi terhadap perekonomian | 30 |
| 10. Pengaruh teknologi terhadap pendidikan..... | 30 |
| 11. Upaya dalam peningkatan pengalaman belajar digital..... | 31 |
| 12. Perangkat Dan Teknologi Untuk Belajar Secara Digital | 31 |
| 13. Proses pendanaan yang dikelola dan dipertanggung jawabkan | 32 |
| 14. Upaya Kebutuhan Pengguna Layanan Internet..... | 32 |
| 15. Upaya dalam Proses Pengadaan Barang..... | 33 |
| 16. Tingkat Akses Teknologi Digital di Masyarakat | 33 |
| 17. Strategi dalam menyikapi jaringan sosial di berbagai informasi..... | 34 |
| 18. Sistem Penyebaran Informasi..... | 34 |
| 19. Langkah dalam penerepan jangka panjang | 35 |
| 20. Penerapan dan evaluasi program jangka panjang..... | 36 |
| 21. Pengimplementasian sesuai dengan visi misi..... | 36 |
| 22. Analisis penilaian indikator Digital Village Index DVI | 37 |
| 23. <i>Service Level Agreement</i> (SLA)..... | 42 |
| 24. Daftar Pemeran Yang diusulkan | 43 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor Urut | Halaman |
|---|---------|
| 1. Peta administrasi Kabupaten Jeneponto | 4 |
| 2. Struktur organisasi pemerintah desa Pallantikang | 5 |
| 3. Tujuan pembangunan berkelanjutan..... | 6 |
| 4. Kerangka penelitian sistem informasi | 11 |
| 5. <i>Design Science penelitian</i> | 15 |
| 6. Diagram alur penelitian | 17 |
| 7. Peta digitalisasi kawasan desa Pallantikang..... | 23 |
| 8. Proses Bisnis Yang Sedang Berlangsung..... | 39 |
| 9. Usulan proses bisnis yang baru Persuratan | 41 |
| 10. <i>Use Case Diagram</i> Persuratan | 43 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor Urut | Halaman |
|---|---------|
| 1. Daftar Pertanyaan Wawancara | 48 |
| 2. Surat Permohonan Izin Penelitian | 56 |
| 3. Lembar Pernyataan Kesiediaan Wawancara Kepala Desa | 57 |
| 4. Dokumentasi Penelitian | 63 |
| 5. Dokumentasi Wawancara Peneliti Dengan Informan | 63 |
| 6. Analisis Penilaian Kesiapan Berdasarkan Indikator DV | 65 |
| 7. Transkrip Wawancara | 65 |
| 8. Riwayat Hidup | 102 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Digitalisasi berasal dari kata digital, menurut Kamus Bahasa Indonesia *online* artinya berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu dan berhubungan dengan penomoran. Digitalisasi dimaknai dengan proses pemberian atau pemakaian sistem digitalisasi proses bisnis ditunjukkan dengan penggunaan teknologi digital dalam menjalankan praktik bisnis, seperti penjadwalan rapat digital, streaming langsung di media sosial, pemesanan, pengiriman, pelacakan dan penjualan secara *online*. Digitalisasi dalam proses bisnis ditemukan meningkatkan inklusivitas keuangan dan berdampak signifikan terhadap kemampuan akses pendanaan melalui perbankan pelaku usaha mikro di beberapa negara anggota ASEAN (Insani, 2023).

Digitalisasi dalam pemerintahan desa merupakan fenomena yang semakin berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tujuan dari digitalisasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik serta mengurangi permasalahan birokrasi (Muslikhah, 2023). Di lain pihak, Program Desa Digital merupakan salah satu bentuk representasi gerakan dengan konsep dan tujuan sebagaimana tersebut di atas yang mengambil lingkup perdesaan biasa terdapat model ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dari sisi biaya dan waktu, serta meningkatkan keamanan dan transparansi proses penarikan dana desa melalui otentifikasi penarikan dana berjenjang dan jejak transaksi yang dapat terekam bagi aparatur desa, serta membuka peluang untuk terhubung dengan layanan keuangan formal bagi masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan transaksinya sehari-hari (Fitriansyah, 2021).

Menurut Fardani (2021), Desa adalah salah satu unit pemerintahan terkecil di Indonesia. Dalam program digitalisasi yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah, desa menjadi ujung tombak pelaksanaannya. Namun, banyak desa yang belum melakukan kajian kesiapan secara menyeluruh sebelum mengadopsi konsep desa digital. Pembangunan desa di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Program Desa Digital bertujuan untuk menyediakan akses internet di desa-desa yang sebelumnya tidak memiliki koneksi internet sama sekali. Secara konseptual, desa digital adalah program yang dirancang untuk menjadikan desa sebagai wilayah pembangunan yang memberdayakan masyarakat dengan dukungan teknologi informasi yang memadai.

Desa Pallantikang terletak di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu desa di wilayah ini, Pallantikang memiliki potensi yang signifikan dalam bidang pertanian dan perkebunan, yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Namun, seperti banyak desa lainnya di Indonesia, Pallantikang menghadapi berbagai tantangan dalam hal administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya. Meskipun terdapat banyak potensi, Desa Pallantikang masih terhambat oleh proses administrasi yang manual dan kurang efisien. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelayanan, kurangnya

transparansi, serta sulitnya akses informasi bagi masyarakat. Selain itu, infrastruktur teknologi yang terbatas menjadi penghalang utama dalam upaya modernisasi desa ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan persiapan digitalisasi desa dengan berjudul "Perancangan Sistem Digitalisasi Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Berbasis *Business Process Management*" untuk mengukur kesiapan digitalisasi desa. Hal ini juga didukung dengan minimnya penelitian yang mengangkat tentang analisis pengukuran kesiapan atau kematangan desa khususnya di Indonesia. Penelitian ini terkait tentang indeks desa digital, menjadi suatu kajian yang menarik karena ini merupakan kajian yang baru nantinya memperkaya kajian-kajian lain tentang desa digital. Dengan adanya penelitian ini, nantinya dapat dijadikan sebagai cara untuk menemukan beberapa kelemahan dan kekuatan yang pada desa tersebut. Sehingga hal tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk Menyusun rencana pembangunan berkelanjutan yang baik dan efektif di masa depan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat maju.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat kematangan digital di Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana merancang sistem digitalisasi desa berbasis *Business Process Management* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kematangan digital di Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto
2. Untuk merancang sistem digitalisasi desa berbasis *Business Process Management* (BPM) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang dilakukan, agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan, maka masalah yang dibahas dibatasi sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah Desa Pallantikang di Kabupaten Jeneponto
2. Subjek penelitian aparat desa dan masyarakat Desa Pallantikang.
3. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif berdasarkan wawancara mendalam kepada kepala desa, kepala sekolah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai kantor desa, pegawai BUMDES.
4. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan indikator *Digital Village Index* (DVI).

5. Indikator *Digital Village Index* (DVI) yang digunakan yaitu: *digital coordination team, digital business and economy, digital education, procurement service, digital sosial integration, service hub system*
6. *Output* dari penelitian ini adalah rancangan *Business Process Management* (BPM).

1.5 Landasan Teori

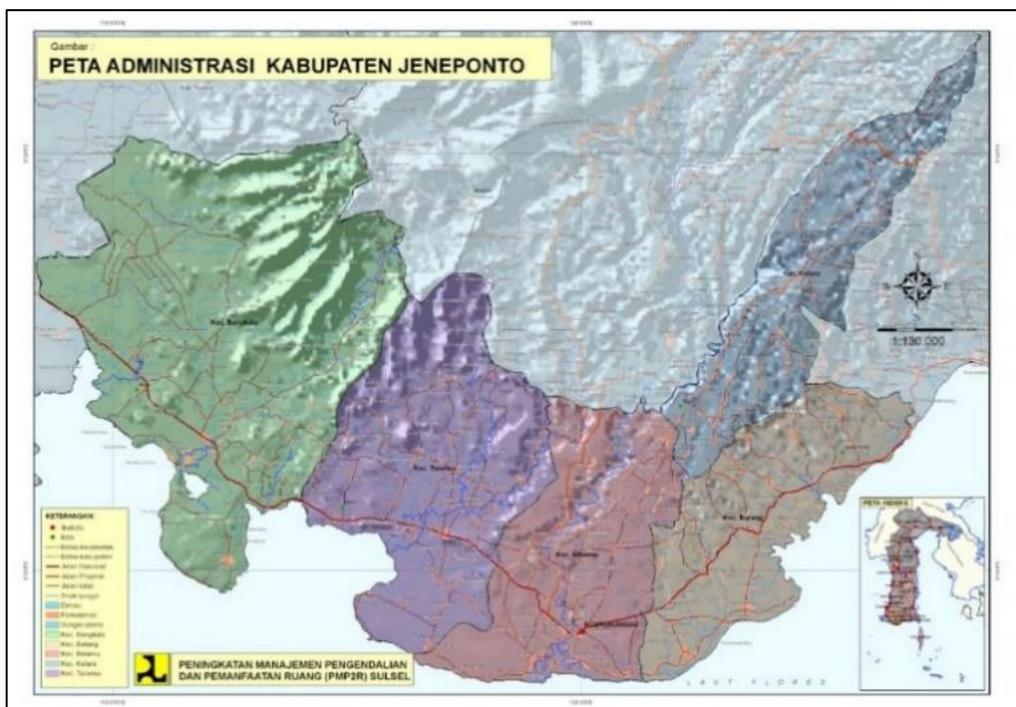
1.5.1 Digitalisasi Desa

Digitalisasi adalah proses membuat atau memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan teknologi dan data digital, digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan, dan menciptakan budaya digital. Penelitian tentang digitalisasi desa yang dalam ini akan membangun suatu sistem mengenai pelayanan administrasi desa yang tadinya secara manual akan diubah menjadi secara elektronik dengan menerapkan aplikasi pelayanan administrasi desa agar dapat memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan dan juga agar mempermudah dari sistem birokrasi di desa (Ramdani, 2021).

Digitalisasi desa merujuk pada upaya untuk mengadopsi teknologi digital dan informasi di wilayah pedesaan atau desa dengan tujuan meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas layanan, serta memajukan pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa. Digitalisasi desa melibatkan penerapan berbagai solusi teknologi informasi dan komunikasi.

1.5.2 Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala

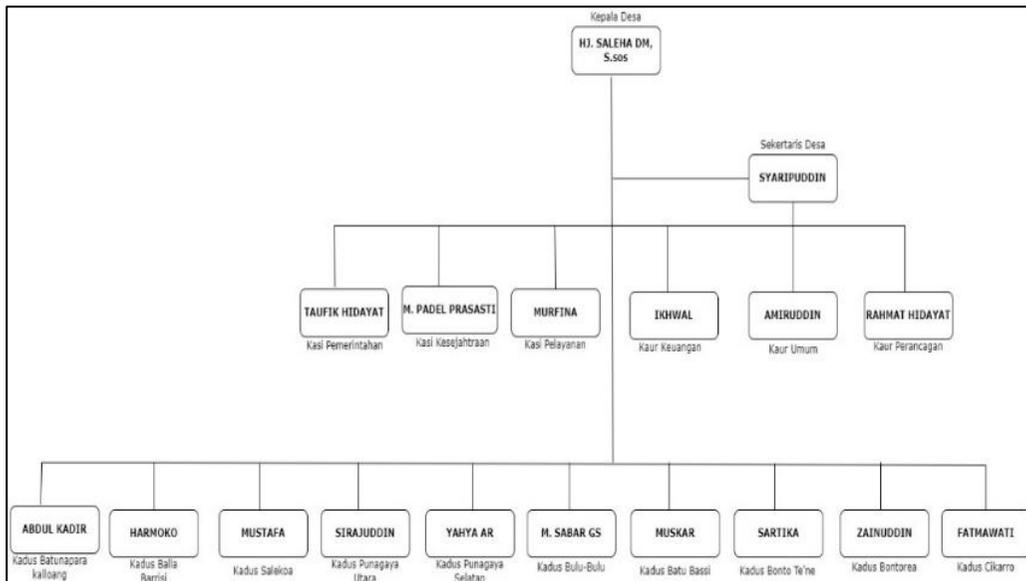
Desa Pallantikang adalah salah satu desa yang secara administratif berada di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Desa Pallantikang Kec. Bangkala Kab. Jeneponto ini terbagi atas 10 (sepuluh) dusun yaitu, Bontotene, Batu Bassi, Bulu-Bulu, Cikarro, Bontorea, Punagaya Selatan, Punagaya Utara, Balla Barrisi, Salekoa, dan Batunapara Kalloang.



Gambar 1. Peta administrasi Kabupaten Jeneponto

Menurut Abdul, dkk. (2022) Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto merupakan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait pengembangan BUMDes. BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan masyarakat dapat terlibat langsung dalam menciptakan inovasi-inovasi berbasis desa sehingga potensi ekonomi yang dimiliki desa setempat dapat digerakkan secara lebih terorganisir. Di era milenial seperti sekarang ini, desa tidak bisa lagi dipandang sebagai suatu wilayah yang terbelakang dikarenakan pemerintah telah mampu menghadirkan sebuah program yang menjadikan desa sebagai lokomotif perekonomian di Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan pula Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, tangguh dan profesional. Adapun pelayanan administrasi surat di Desa Pallantikang, Kabupaten Jeneponto masih menggunakan cara konvensional atau manual sehingga masih kurang efektif dan efisien. Masyarakat sering mengalami kesulitan ketika melakukan pengajuan surat yang terbatas oleh ruang dan waktu, seperti halnya masyarakat diperlukan untuk ke balai desa serta hanya dapat diajukan ketika jam kerja. Selain itu, arsip administrasi surat yang banyak memerlukan kapasitas penyimpanan yang juga besar, serta rawan terhadap kerusakan berkas secara fisik. Pengabdian ini bertujuan menerapkan.

Struktur pemerintahan Desa Pallantikang dipimpin oleh Kepala Desa yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa. Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara, dan berbagai kepala urusan (seperti urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan). Desa ini juga terbagi menjadi 10 (Sepuluh) dusun yaitu :Bontotene, Batu Bassi, Bulu-Bulu, Cikarro, Bontorea, Punagaya Selatan, Punagaya Utara, Balla Barrisi, Salekoa, dan Batunapara Kalloang, mempermudah pengelolaan administratif serta layanan publik di tingkat lokal.



Gambar 2. Struktur organisasi pemerintah desa Pallantikang

1.5.3 Sustainable Development Goals (SDGs)

Menurut Kementerian Bappenas Sustainable Development Goals atau biasa disingkat dengan SDGs yang memiliki arti tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan rangkaian dari beberapa tujuan yang telah dibuat dan disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di dunia untuk panduan seluruh negara dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. SDGs ini telah disahkan melalui sidang umum PBB yang diadakan pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang saling terkait satu sama lain yang meliputi aspek pembangunan, penghapusan kemiskinan hingga perlindungan lingkungan.

Program Nawacita 2014 adalah prioritas pembangunan pemerintah. Kemudian, dilanjutkan Nawacita tahap kedua, negara memiliki prioritas pembangunan mulai dari desa dan daerah terluar. Hal ini mengandung arti bahwa prioritas pembangunan yang sebelumnya terpusat di perkotaan beralih dengan mengembangkan pembangunan di kawasan desa dan daerah terluar. Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan permukiman. Dari pengertian

tersebut diperlukan pola pembangunan yang berbeda sebagaimana kearifan lokal desa yang didasarkan dari karakteristik, potensi alam dan sosial budaya di pedesaan dapat dikembangkan selaras dengan pola pembangunan modern. Pembangunan desa juga perlu melibatkan unsur-unsur yang terdapat di desa seperti Lembaga-lembaga yang ada di pedesaan, dan unsur penggerak ekonomi seperti BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan Kewirausahaan Masyarakat. Kesemua unsur tersebut menjadi bahan pemetaan pada pola pembangunan desa yang berkelanjutan (Prasetyo, 2020).

Hal ini juga tertuang dalam kebijakan SDGs (Sustainable Development Goals) yang dijelaskan melalui Kementerian Desa dan Pengembangan Daerah Tertinggal RI pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kebijakan SDGs diterjemahkan menjadi SDGs Desa sebagaimana dalam pembangunan desa terdapat 18 Kebijakan Arah Pembangunan Desa Berkelanjutan. SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020. *Sustainable Development Goals* (SDGs) terdiri dari 18 tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan desa berkelanjutan
5. Kesetaraan gender
6. Desa layak bersih dan sanitasi
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pertumbuhan ekonomi desa merata
9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13. Desa tanggap perubahan iklim
14. Desa peduli lingkungan laut
15. Desa peduli lingkungan daratan
16. Desa damai berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya.



Gambar 3. Tujuan pembangunan berkelanjutan
[\(https://updesa.com/sdgs-des/\)](https://updesa.com/sdgs-des/)

Bappenas juga menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) pilar pada SDGs yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial
Pembangunan sosial pada SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2. Pilar Pembangunan Lingkungan
Pembangunan lingkungan pada SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
3. Pilar Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi pada SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industry inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
Pembangunan hukum dan tata kelola pada SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

1.5.4 Desa Digital

Desa digital merupakan konsep program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Dalam desa digital, pelayanan publik akan bersifat digital dengan terkoneksi melalui jaringan nirkabel. Pelayanan yang bersifat digital akan mendorong peningkatan layanan publik di desa-desa dan mempermudah perangkat desa untuk melakukan evaluasi dan perbaikan layanan dengan basis data yang nantinya dimiliki (Rindengan 2021).

Menurut Suyatna (2019) Perkembangan desa digital itu dapat dipengaruhi setidaknya oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang berada di desa-desa. Apabila pendidikan mereka semakin baik, tentunya hal ini dapat pula menjadikan mereka semakin “paham teknologi informasi”. Secara teoritis, untuk sampai ke tahap paham teknologi informasi, maka harus diawali dulu dengan apa yang disebut dengan “paham informasi” (*information literacy*). Oleh karena itu, maka keadaan paham teknologi informasi ini jelas menempatkan pendidikan sebagai faktor (kunci) utamanya. Kedua, akses terhadap teknologi informasi. Saat ini, teknologi informasi sudah menjadi sesuatu yang umum, yang cenderung dapat dengan mudah diakses (dijangkau) dan dipelajari oleh sebagian anggota masyarakat. Ketiga, keseriusan upaya dari pemerintah untuk semakin memperkenalkan teknologi informasi kepada masyarakat, yang hal ini tidak lain akan bermuara pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang berbasiskan teknologi informasi (*good e-government*).

1.5.5 Digital Village Index (DVI)

Digital Village Index (DVI) atau indeks desa digital merupakan suatu metode atau teknik pengukuran kesiapan dan kematangan digitalisasi pada suatu desa melalui analisis indikator relevan yang sesuai dengan desa tersebut (Yusuf, 2021). Indeks Desa Digital (*Digital Village Index*) adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di desa atau wilayah pedesaan. Indeks Desa Digital memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu desa atau wilayah pedesaan telah memanfaatkan teknologi digital, termasuk aspek-aspek seperti akses lainnya. Menurut (Sagita, 2020).

Berdasarkan hasil pendataan IDM (Indeks Desa Membangun) menunjukkan tingkat pembangunan desa dilabel dengan status tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Kemudian hasil Pengkategorian IPD (Indeks Potensi Desa) menghasilkan desa tertinggal sebanyak 14.461 desa (19,17 %), desa berkembang sebanyak 55.369 desa (73,40 %), dan desa mandiri sebanyak 5.606 desa (7,43%). Dalam periode 2015-2019 jumlah desa tertinggal memang telah meningkat banyak statusnya menjadi desa berkembang dengan asumsi pembangunan desa atas amanat Undang-Undang Desa telah dilaksanakan dengan baik, namun jika kita telah lebih lanjut lagi jumlah desa mandiri hanya sekitar 7% saja, artinya hanya sedikit sekali desa maju yang naik menjadi Desa mandiri. Pada penelitian yang akan dilakukan pada Desa Pallantikang, Kabupaten Jeneponto, nantinya akan dipilih indikator relevan yang sesuai dengan desa tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.Indikator digitalisasi desa

| No | Indikator |
|----|---|
| 1. | Digital <i>leadership, vision, and policy</i> , adalah indikator yang menilai sejauh mana pemimpin dan kebijakan yang ada di desa mendorong untuk mengembangkan teknologi digital. Jiwa kepemimpinan diperlukan untuk mengelola suatu organisasi ke era digital serta dapat memastikan penggunaan teknologi secara efektif, inovatif dan sesuai tujuan organisasi. |
| 2. | Digital <i>coordination team</i> , sekumpulan kelompok yang diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinir suatu kegiatan digital. Perannya sebagai penghubung untuk membantu dan memaksimalkan nilai investasi digital dan mengimplementasikan inisiatif digital. Misalnya mempromosikan produk dan layanan desa menggunakan platform seperti media sosial, pemasangan internet dan lain-lain. |
| 3. | Digital <i>connectivity</i> , sekumpulan kelompok yang diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinir suatu kegiatan digital. Perannya sebagai penghubung untuk membantu dan memaksimalkan nilai investasi digital dan mengimplementasikan inisiatif digital. Misalnya mempromosikan produk dan layanan desa menggunakan platform seperti media sosial, pemasangan internet dan lain-lain. |
| 4. | Digital <i>human resource and citizen</i> menilai tingkat kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan kemampuan dalam mengakses informasi dan layanan digital. Misalnya pelatihan digital seperti pelatihan menggunakan perangkat lunak, coding, atau pengembangan aplikasi. |

Lanjutan Tabel 1

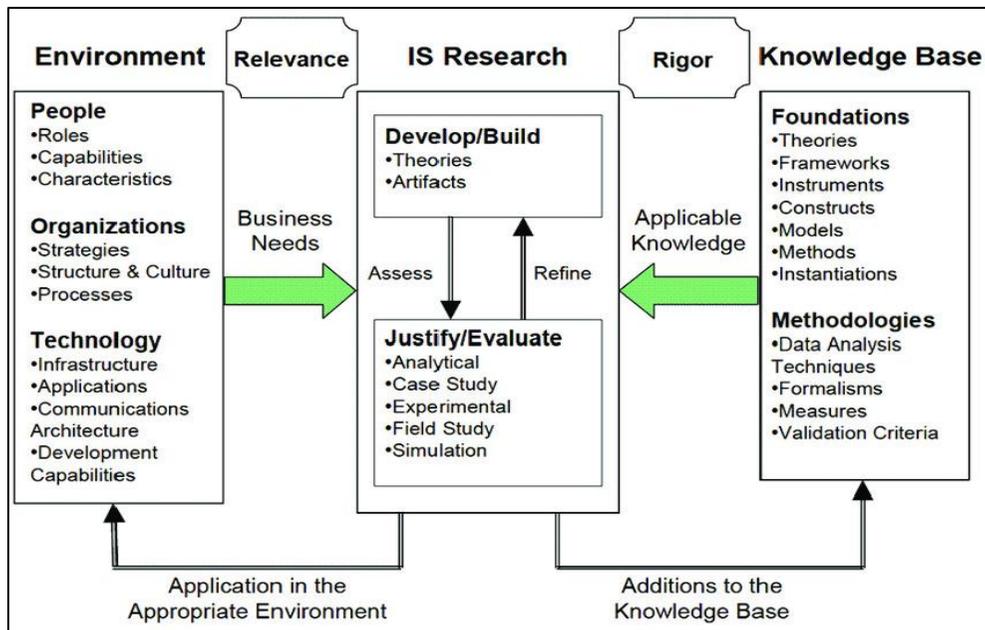
| Indikator |
|---|
| 5. Digital <i>education</i> menilai ketersediaan dan penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran anak di sekolah. Misalnya penggunaan aplikasi pembelajaran, <i>e-book</i> , serta video pembelajaran online. |
| 6. Digital <i>business and economy</i> , pengembangan ekonomi digital dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kegiatan bisnis. Misalnya toko online yang menjual produk-produk pertanian dan lain-lain. |
| 7. Digital <i>public services</i> pelayanan publik secara digital kepada masyarakat untuk mengefisienkan waktu serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Misalnya adanya <i>e-government</i> , <i>e-health</i> , <i>e-education</i> , <i>e-participation</i> dan lain-lain. |
| 8. Digital <i>tourism</i> pengembangan pariwisata berbasis digital untuk meningkatkan daya Tarik pariwisata desa, meningkatkan pemasukan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata desa. Seperti website atau aplikasi turis yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat. |
| 9. Digital <i>sosial integration</i> , Keterlibatan masyarakat dalam mengadopsi teknologi digital serta kemampuan desa memanfaatkannya dan memperkuat hubungan antar masyarakat. Misalnya pemanfaatan sosial media seperti facebook, twitter, atau Instagram untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan di desa. |
| 10. Digital <i>infrastructure</i> adanya pembangunan infrastruktur teknologi digital di desa yang memadai seperti akses internet, telepon seluler, dan layanan jaringan komunikasi. Untuk meningkatkan aksesibilitas internet di desa, dapat memperluas jangkauan jaringan seluler seperti pembangunan hotspot Wi-fi. |
| 11. Digital <i>government</i> menilai tingkat pemerintah desa dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan layanan publik, keterbukaan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Contohnya pemerintah desa dapat membangun sistem sensor yang memantau kualitas udara dan lingkungan, membangun sistem pengumpulan data dan lain-lain |
| 12. Digital <i>roadmap</i> , rencana strategis pengembangan teknologi digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya pembangunan infrastruktur digital, pusat layanan digital, pembangunan aplikasi, pengembangan produk dan lain-lain. |
| 13. Digital <i>architecture</i> pengembangan faktor keamanan dan privasi dalam mengembangkan infrastruktur teknologi digital. Desa harus memastikan bahwa jaringan internet yang digunakan oleh masyarakat aman dari ancaman dan serangan malware dan kejahatan siber. |
| 14. Digital <i>finance and budgeting</i> pengaturan keuangan dan anggaran di desa dapat memanfaatkan teknologi digital. Misalnya adanya sistem informasi keuangan digital sehingga pemantauan dan pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara efektif. |

Lanjutan Tabel 1

| No | Indikator |
|-----|---|
| 15. | Digital <i>business process innovation</i> penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan dan mengoptimalkan proses bisnis yang ada serta melibatkan penerapan teknologi digital seperti otomatisasi, analitik, kecerdasan buatan, internet of things dan lain-lain. Misalnya pengimplementasian sistem workflow automation untuk mengurangi kerja manusia dalam proses persetujuan, verifikasi, atau pengolahan data. |
| 16. | Data <i>center service</i> pengelolaan dan penyimpanan data secara digital yang dapat menjaga keamanan data. Seperti pembangunan infrastruktur data center untuk mengelola data, backup data, dan <i>cloudbased data center</i> . |
| 17. | <i>Networking</i> , Membangun jaringan komunikasi digital yang efektif untuk menghubungkan pihak desa dan di luar desa. Misalnya infrastruktur jaringan dan penggunaan media sosial. |
| 18. | <i>Service hub system</i> , penyediaan akses terhadap pelayanan publik secara terintegrasi. Desa membuka pusat layanan yang terintegrasi dan terpusat kemudian pusat dapat memberikan informasi dan pelayanan yang terkait dengan kesehatan, Pendidikan, perizinan, dan lain-lain. |
| 19. | Digital <i>security</i> melindungi sistem digital dari serangan atau ancaman keamanan dari luar. Penggunaan sertifikasi digital untuk melindungi data dan informasi yang sensitif seperti data kependudukan atau data keuangan. |
| 20. | Digital <i>asset</i> menciptakan aset digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aset tersebut mencakup file elektronik, data, dokumen, gambar, video, audio, aplikasi, situs web, dan lain-lain. Desa membangun aplikasi yang memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang layanan publik atau memudahkan transaksi bisnis. |
| 21. | <i>Procurement service</i> , adanya pengadaan barang dan jasa menggunakan teknologi digital. Desa mengembangkan portal pengadaan online yang memungkinkan para pihak seperti vendor dan masyarakat untuk mengakses informasi tentang tender dan pengadaan barang dan jasa. |
| 22. | <i>Open data service</i> menyediakan akses terbuka dan mudah untuk data yang dimiliki oleh desa. Desa memiliki portal desa yang menyediakan akses terbuka kepada masyarakat untuk mengakses data. Portal tersebut bisa berisi data tentang demografi, ekonomi, sosial, lingkungan, dan layanan publik di desa. |
| 23. | <i>Digital public complain</i> adanya platform online yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengaduan, menangani keluhan, dan melacak yang melibatkan pihak-pihak publik. Desa menyediakan platform online untuk pengaduan atau keluhan secara digital dapat berupa situs web atau aplikasi seluler. |
| 24. | Digital <i>regulation</i> menilai kemampuan desa dalam mengatur dan mematuhi kebijakan, peraturan, dan hukum terkait teknologi digital. |

(Sumber: Yusuf, 2021)

1.5.6 Lingkungan Sistem Informasi



Gambar 4. Kerangka penelitian sistem informasi
(Sumber: Hevner et al, 2004)

Berdasarkan Gambar 4, tersebut menyajikan tentang kerangka kerja konseptual untuk memahami, melaksanakan dan mengevaluasi penelitian sistem informasi yang menggabungkan paradigma tentang ilmu perilaku dan ilmu desain. Perilaku tersebut membahas tentang penelitian melalui pengembangan dan pembenaran teori yang menjelaskan atau memprediksi fenomena yang terkait dengan kebutuhan bisnis teridentifikasi. Didalamnya terdapat tujuan, tugas, masalah, dan peluang yang menentukan kebutuhan bisnis seperti yang dirasakan oleh orang-orang di dalam organisasi (Hevner, 2004).

Information System (IS) design science research atau biasa lebih dikenal dengan *framework* Hevner merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian *information sistem (IS)*. Kerangka konseptual Hevner memiliki 3 komponen didalamnya yaitu lingkungan (*environment*), penelitian SI (*IS research*) dan dasar pengetahuan (*knowledge base*). Menurut Simon (1996) lingkungan mendefinisikan ruang masalah yang didalamnya terdapat tujuan, tugas, dan masalah yang mendefinisikan kebutuhan bisnis berdasarkan yang dirasakan oleh orang-orang dalam organisasi. Pada penelitian ini orang-orang yang bekerja di kantor Desa Pallantikang dan juga beberapa tokoh masyarakat yang memiliki kepentingan di Desa Pallantikang merupakan *people* atau *stakeholder*, aspek yang perlu dipertahankan mewakili organisasi, dan pada bagian teknologi adalah menjelaskan teknologi/infrastruktur apa saja yang digunakan perusahaan. Selanjutnya yaitu dasar pengetahuan, dasar pengetahuan menyediakan bahan baku dari mana dan melalui sebagaimana penelitian sistem informasi dilakukan. Dasar pengetahuan (*knowledge base*) terdiri dari fondasi dan metodologi, metodologi memberikan pedoman yang digunakan dalam fase

pembenaran/evaluasi. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam berdasarkan indikator *framework DVI*. *Framework DVI* pada penelitian ini berfungsi sebagai fondasi. Selanjutnya yaitu *IS Research* yang terdiri dari membangun/mengembangkan yaitu proses kegiatan yang penulis lakukan, penelitian ini berada pada ranah berdasarkan *justify/evaluate*, lebih tepatnya termasuk *field study*. Pada penelitian ini artefak yang dihasilkan yaitu sebuah *business process management*.

1.5.7 Business Process Management (BPM)

Menurut Lawler dan Barber (2008), BPM adalah satu pendekatan untuk mencapai tujuan bisnis, mengkoordinasi proses-proses akhir dari perusahaan, *menciptakan best practices*, dan perangkat lunak perlengkapan, seperti di dalam suatu sistem manajemen proses bisnis, untuk mendeskripsikan peneliti, dan menambahkan efisiensi dari proses terhadap goal bisnis. Menurut Jeston dan Nelis (2008) BPM adalah pencapaian tujuan organisasi melalui perbaikan, pengelolaan dan pengendalian dari bisnis proses yang penting proses bisnis operasional BPM merupakan suatu pendekatan manajemen holistik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis seiring upaya untuk mencapai inovasi, fleksibilitas dan integrasi dengan teknologi. BPM berupaya untuk melakukan perbaikan proses secara berkelanjutan atau juga disebut sebagai proses optimalisasi.

Business Process Management (BPM) adalah pendekatan yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan mengotomatisasi proses bisnis dalam sebuah organisasi atau entitas. *Business Process Management (BPM)* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan memastikan kualitas pelayanan dengan fokus pada pemahaman yang mendalam tentang proses-proses yang ada. BPM dalam digitalisasi desa merupakan pendekatan yang dapat membantu dalam merancang ulang proses-proses administratif dan pelayanan desa untuk mencapai efisiensi maksimum. *Business Process Management (BPM)* setiap langkah dalam proses bisnis dapat dianalisis, dioptimalkan, dan diotomatisasi sesuai kebutuhan. *Business Process Management (BPM)* juga memungkinkan pemantauan *real-time*, perbaikan berkelanjutan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan desa.

Business Process Management (BPM) merupakan sebuah disiplin manajemen berfokus pada peningkatan kinerja organisasi melalui peningkatan, mengelola dan mengendalikan proses bisnis (Dallas & Wynn, 2014). BPM merupakan salah satu metode pendekatan yang sangat bermanfaat. Dalam beberapa tahun terakhir BPM telah banyak diperhatikan karena potensinya yang secara signifikan meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya dalam mengelola proses bisnis.

Business Process Management (BPM) harus memperhatikan karakteristik unik masing-masing perusahaan. Skala organisasi adalah salah satu karakteristik terpenting untuk diingat. Penciptaan model kematangan untuk proses bisnis adalah salah satu bidang utama BPM yang mendapat banyak perhatian. Organisasi harus menggunakan tingkat kematangan untuk mempertimbangkan proses manajemen yang ada dan menemukan area sebagaimana mereka dapat meningkatkan kematangan mereka. *Business Process Management (BPM)* adalah seni dan ilmu yang mengawasi cara

kerja yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk memastikan hasil yang konsisten dan untuk mengambil keuntungan peluang perbaikan. Dalam konteks ini setelah “perbaikan” memiliki arti yang berbeda tergantung pada tujuan organisasi (Rosa Dkk, 2013). *Business Process Management* (BPM) adalah proses pendekatan yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengelola proses bisnis dengan efisien dan efektif. Pemodelan proses bisnis menggambarkan alur dari aktivitas bisnis yang bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Dalam pemodelan proses bisnis proses, metode yang digunakan dalam menggambarkan setiap alur harus dimengerti dan mudah dipahami. Dalam menggambar alur proses bisnis, berikut beberapa simbol dasar yang digunakan. Pengelolaan suatu organisasi atau perusahaan bisnis proses manajemen ini adalah suatu pendekatan yang diterapkan untuk tujuan jangka panjang. Tujuan tersebut yang dapat memastikan pengelolaan organisasi atau perusahaan sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan proses bisnis ada dua komponen penting yang harus diterapkan atau diimplementasikan, karena dapat membantu memastikan bahwa suatu proses bisnis berjalan secara lancar dan sesuai dengan kepentingan dan tujuannya. Dua komponen tersebut adalah:

- a. *Service Level Agreement* (SLA) adalah perjanjian yang ditetapkan antara penyedia layanan BPM (misalnya, perusahaan konsultan BPM atau penyedia perangkat lunak BPM) dan klien atau organisasi yang menggunakan layanan BPM. SLA BPM menetapkan standar kinerja dan ekspektasi yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan dalam mendukung proses bisnis klien atau organisasi.
- b. *Operation Level Agreement* (OLA) adalah perjanjian antara unit atau departemen internal dalam sebuah organisasi yang terlibat dalam menjalankan proses bisnis tertentu. OLA menetapkan tanggung jawab, kewajiban, dan komitmen antar unit atau departemen untuk mendukung dan menjalankan bagian-bagian spesifik dari proses bisnis yang lebih luas.

Adapun perbedaan *Service Level Agreement* (SLA) dan *Operation Level Agreement* (OLA) adalah:

Service Level Agreement (SLA) adalah perjanjian antara penyedia layanan eksternal (seperti konsultan BPM atau penyedia perangkat lunak BPM) dengan klien atau organisasi yang menggunakan layanan tersebut. Tujuannya menetapkan standar kinerja yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan eksternal dalam mendukung proses bisnis organisasi. Ini mencakup aspek seperti waktu respons, ketersediaan layanan, serta tingkat kualitas yang dijanjikan. SLA berfokus pada hubungan antara penyedia layanan eksternal dan pelanggan, dengan penekanan pada pemenuhan ekspektasi layanan. Sedangkan Pihak yang terlibat *Operation Level Agreement* (OLA) adalah perjanjian internal antar unit atau departemen dalam organisasi yang sama, misalnya antara tim IT dan tim operasional. Tujuannya Menetapkan tanggung jawab dan komitmen masing-masing unit dalam mendukung bagian tertentu dari proses bisnis yang lebih besar. Fokusnya adalah memastikan bahwa semua unit internal bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. *Operation Level Agreement* (OLA) lebih berfokus pada kolaborasi dan tanggung jawab internal dalam sebuah organisasi, memastikan koordinasi yang tepat antar tim atau departemen.

Perancangan Sistem Pelayanan administrasi Kependudukan dalam Menunjang Digitalisasi Desa”. Administrasi pelayanan desa adalah suatu hal yang utama dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di mana desa adalah menjadi ujung tombak dari pemerintah yang langsung dekat dengan masyarakat, karena pelayanan publik yang pertama pasti dilakukan di desa sehingga hal ini harus dapat perhatian khusus dari pemerintah pusat yang saat ini perencanaan program digitalisasi desa (Priatna 2021).

“Advokasi Digitalisasi Desa dalam pengembangan potensi “Desa Cibodas Lembang sebagai Desa Digital”, proses pemetaan desa dan literasi desa diperoleh beberapa kendala seperti terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan internet, infrastruktur yang masih minim karena *tower* jaringan menyeluruh dirasakan oleh masyarakat, dan masih minim sosialisasi mengenai pemasaran hasil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara digital.

“Digitalisasi Desa di Desa Cikole Lembang” dihasilkan sebuah sistem informasi desa yang menyimpan dan menampilkan kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa Cikole. Kegiatan digitalisasi sistem informasi desa berbasis partisipasi masyarakat di desa cikole, memberikan dampak positif kepada mitra yang terlihat. Dari hasil FGD (*Focus Group Discussion*) yang didapat, masukan-masukan warga mengenai program digitalisasi akan dimasukkan kedalam kegiatan desa. Kegiatan digitalisasi sistem informasi desa berbasis partisipasi.

“Digitalisasi Desa sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan *Good Governance*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arah dan kebijakan pembangunan desa hingga 2030 merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ada tiga hal besar yang ditargetkan yaitu Pertama, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan desa yang bertumpu pada revitalisasi BUMDes dan BUMDes. Hal ini sangat memungkinkan karena selama ini BUMDes akan menjadi Badan Hukum setelah disahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, penyediaan listrik desa.

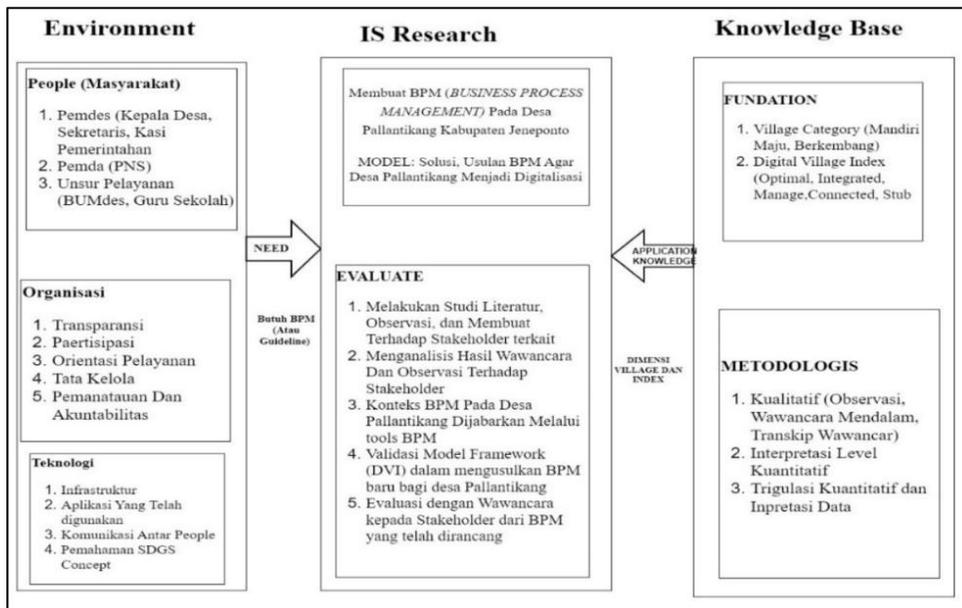
BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan ini akan memberikan wawasan yang mendalam mengenai tantangan, peluang, dan dinamika yang ada dalam konteks digitalisasi Desa Pallantikang. Data kualitatif akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan makna-makna yang muncul, yang pada akhirnya akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang sesuai dan mendukung perkembangan desa Pallantikang.

2.2 Design Science Penelitian

Desain sains penelitian merupakan suatu proses atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan bersifat objektif. Adapun mengenai desain sains pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 5. Design Science penelitian

Berdasarkan gambar 5, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan berdasarkan indikator dari *Digital Village Index* (DVI) dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan desa yang menjadi fokus penelitian. Setelah data wawancara diperoleh, langkah berikutnya adalah transkripsi wawancara dan analisis data. Proses analisis dilakukan dengan mereduksi data yang signifikan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid atau melakukan verifikasi data. Selain itu, hasil

wawancara akan menghasilkan sebuah artefak yang dibuat untuk mengatasi masalah yang ada dan dievaluasi berdasarkan utilitasnya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu artefak yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Business Process Management* (BPM), yang merupakan pendekatan terstruktur untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metodologi yang komprehensif. Artefak adalah objek atau produk yang dihasilkan dari proses penelitian atau pengembangan, yang memiliki fungsi atau tujuan tertentu untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan dalam konteks tertentu. Artefak bisa berupa model, sistem, alat, dokumen, atau bentuk lain yang memberikan solusi atau peningkatan dalam suatu proses atau bidang tertentu

2.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto tempat sebagaimana penulis mendapatkan data yang ingin diolah.

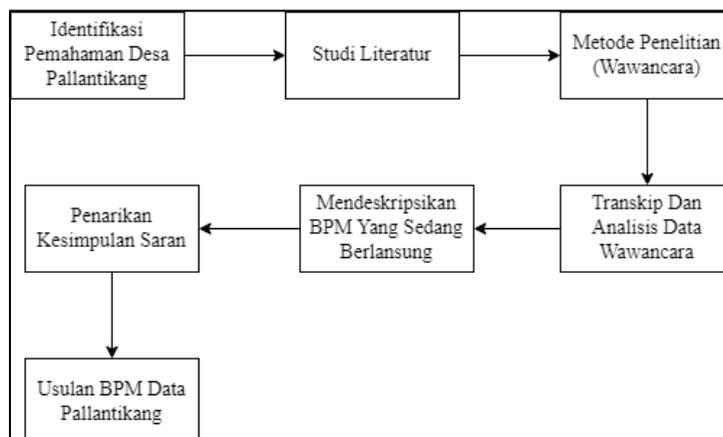
Tabel 2. Waktu penelitian

| No | Rencana Kegiatan | Waktu Pelaksanaan (2024) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|---------|---|---|---|-----|---|---|---|
| | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | | Januari | | | | Mei | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | Studi literatur | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penentuan Stakeholder | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pembuatan List Pertanyaan berdasarkan indikator DVI | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 4 | Pelaksanaan wawancara mendalam | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 5 | Transkrip wawancara | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 6 | Analisis data wawancara | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 7 | Mendesripsikan BPM yang sedang berlangsung | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 8 | Penarikan kesimpulan | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9 | Usulan <i>Business Process Management</i> Desa Pallantikang | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |

Berdasarkan Tabel 2 diatas merupakan *timeline* penelitian yang memiliki beberapa tahap diantaranya:

1. *Studi Literatur*, sebagaimana peneliti mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara mengumpulkan data melalui jurnal, artikel, buku, maupun media lain.
2. Penentuan *Stakeholder*, sebagaimana peneliti menentukan stakeholder atau individu, komunitas, kelompok yang digunakan dalam penelitian ini
3. Pembuatan List Pertanyaan Berdasarkan Indikator DVI, sebagaimana peneliti membuat daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan indikator yang terdapat dalam DVI dan SDGs.
4. Pelaksanaan Wawancara Mendalam, sebagaimana peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab kepada stakeholder terkait yang telah ditentukan sebelumnya
5. Transkrip Wawancara, sebagaimana peneliti menguraikan kembali isi percakapan dalam tanya jawab yang telah dilakukan dengan cara menuliskan setiap kata dan kalimat yang diucapkan oleh narasumber terkait.
6. Analisis Data Wawancara, sebagaimana peneliti membaca dan memahami isi dari transkrip wawancara untuk melakukan pengelompokan data dengan kategori atau level yang telah ditentukan.
7. Mendeskripsikan BPM yang sedang berlangsung, sebagaimana dari hasil analisis selanjutnya peneliti mendeskripsikan BPM yang sedang berlangsung.
8. Penarikan Kesimpulan, sebagaimana peneliti memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis data yang telah dilakukan.
9. Usulan *Business Process Management* Desa Pallantikang, sebagaimana penulis memberikan usulan BPM yang baru untuk meningkatkan atau lebih memajukan desa tersebut dari segala bidang sehingga dapat menyusun rencana pembangunan berkelanjutan yang lebih efektif dan berada pada tahap digitalisasi.

2.4 Diagram Alur Penelitian



Gambar 6. Diagram alur penelitian

Berdasarkan Gambar, dapat dilihat bahwa penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada di Desa Pallantikang yang mungkin dapat diatasi melalui digitalisasi. Langkah selanjutnya yaitu melakukan studi literatur terkait penelitian yang

akan dilakukan yaitu “*Digital Village index for Indonesia Case Study*”. Dari studi literatur yang dilakukan diperoleh pemahaman mengenai permasalahan, penelitian selanjutnya akan merumuskan masalah yang lebih spesifik dan relevan mengenai kondisi yang ada di Desa Pallantikang saat ini.

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode ini dapat membantu peneliti dalam mendapatkan pemahaman mendalam mengenai konteks dan dampak dari digitalisasi desa. Selanjutnya melakukan observasi penentuan informan, yang melibatkan pemilihan individu yang sesuai studi. Selanjutnya melakukan wawancara mendalam dengan informan yang telah dipilih. Wawancara ini akan mendalami pandangan, dan pengalaman narasumber terkait dengan digitalisasi desa. Data dari hasil wawancara akan ditranskripsi, kemudian dilakukan coding data. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan makna yang muncul dalam data kualitatif *Management* (BPM) yang ada saat ini di Desa Pallantikang. Ini mencakup proses bisnis yang ada, infrastruktur yang digunakan, dan tingkat pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan proses bisnis. Berdasarkan analisis sebelumnya, penelitian ini akan merancang sebuah usulan *Business Process Management* (BPM) yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Desa Pallantikang dalam mendukung proses digitalisasi desa. Hasil penelitian akan diinterpretasikan untuk memahami tingkat kesiapan digital Desa Pallantikang dan dampak dari *Business Process Management* (BPM) yang diusulkan. Dalam mengambil kesimpulan, hasil penelitian akan dibahas, dan rekomendasi tindakan akan diajukan.

2.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang dirancang sendiri oleh peneliti untuk mengukur kesiapan digitalisasi Desa Pallantikang berdasarkan *digital village index* (DVI) menggunakan 6 indikator yang relevan dengan Desa Pallantikang. Pertanyaan-pertanyaan yang dirancang mencakup beberapa dimensi mengenai kesiapan digitalisasi, seperti akses internet, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan desa, literasi digital dan sebagainya. Informan akan diminta untuk memberikan respon terhadap setiap pengalaman dan persepsi mereka terkait aspek-aspek kesiapan digitalisasi desa. Proses pengambilan data dengan wawancara akan direkam menggunakan handphone. Data yang telah diperoleh akan digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan digitalisasi Desa Pallantikang dan faktor yang mempengaruhinya, serta merancang rekomendasi yang dapat meningkatkan keadaan digitalisasi Desa

2.5.1 Indikator

Penelitian ini menggunakan enam indikator yaitu indikator digitalisasi desa. Indikator-indikator ini dipilih untuk menyesuaikan dengan karakteristik desa yang akan diteliti. Berikut adalah penjelasan mengenai indikator-indikator tersebut. Adapun indikator yang diambil yaitu:

1. *Digital coordination team*: Indikator ini berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan proyek digital, membantu mengidentifikasi kebutuhan desa,

meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan teknologi digital desa, memberikan pelatihan teknologi baru kepada masyarakat, serta memelihara sistem informasi yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintahan desa.

2. *Digital bussines and economy*: Indikator ini dapat dijadikan sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi desa, membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa, meningkatkan keterampilan digital masyarakat, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan persaingan global yang semakin luas.
3. *Digital education*: indikator ini memiliki fungsi utama untuk mengukur, mengelola, dan memajukan pendidikan digital ditingkat desa dengan tujuan meningkatkan literasi digital dan kualitas pendidikan seperti pembelajaran online, pembelajaran hibrida, Pendidikan jarak jauh, kelas virtual, dan simulasi Pendidikan.
4. *Procurement service*: indikator ini bertujuan untuk mengelola dan memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa secara efisien dan transparan di tingkat desa menggunakan teknologi digital. Tujuannya untuk memastikan proses pengadaan desa berjalan, menghindari korupsi, dan memastikan desa mendapat barang dan jasa dengan harga yang wajar. Hal ini mencakup akses yang diberikan kepada pemasok lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti pengadaan barang, pengadaan jasa, pengadaan proyek infrastruktur, pengadaan layanan teknologi informasi, dan sebagainya.
5. *Digital sosial integration*: keterlibatan masyarakat dalam mengadopsi teknologi digital serta kemampuan desa memanfaatkannya dan memperkuat hubungan antar masyarakat. Misalnya pemanfaatan sosial media seperti facebook, twitter, atau Instagram untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan di desa.
6. *Service hub sistem*: penyediaan akses terhadap pelayanan publik secara terintegrasi. Desa membuka pusat layanan yang terintegrasi dan terpusat kemudian pusat dapat memberikan informasi dan pelayanan yang terkait dengan kesehatan, Pendidikan, perizinan, dan lain-lain.

2.5.2 Tingkat Pengukuran

Dalam penelitian *Digital Village Index* (DVI) terdapat level atau tingkat pengukuran yang digunakan yaitu:

Tabel 3. Measurement Level

| <i>Value</i> | <i>Level</i> |
|--------------|-------------------|
| 1 | <i>Stub</i> |
| 2 | <i>Connected</i> |
| 3 | <i>Managed</i> |
| 4 | <i>Integrated</i> |
| 5 | <i>Optimal</i> |

(Sumber Yusuf, 2021)

Tabel di atas menyajikan level pengukuran meliputi:

1. *Stub*, peneliti dapat memberikan nilai 1 apabila desa tersebut tidak memiliki atau menyusun, mengatur digitalisasi desa.
2. *Connected*, peneliti dapat memberikan nilai 2 jika desa tersebut telah memiliki teknologi digital, namun belum dilaksanakan.
3. *Managed*, peneliti dapat memberikan nilai 3 apabila desa tersebut telah memiliki teknologi digital dan sudah diimplementasikan.
4. *Integrated*, peneliti dapat memberikan nilai 4 apabila digitalisasi di desa tersebut sudah terintegrasi dengan unit internal atau dengan desa lain.
5. *Optimal*, peneliti dapat memberikan nilai 5 apabila desa tersebut memiliki teknologi digital dan telah dievaluasi, ditinjau, dan memiliki perbaikan yang berkelanjutan.

Selain dari pengukuran tingkat level, *Digital Village Index* (DVI) juga menggunakan rumus sederhana untuk memudahkan peneliti, diantaranya:

$$DVI = \frac{\text{Total Level Values}}{\text{Total Of Aspects}}$$

Keterangan:

| | |
|--------------------------------|--|
| <i>Total level values</i> | = Jumlah keseluruhan nilai pengukuran yang telah dilakukan. |
| <i>Total number of aspects</i> | = Jumlah aspek atau indikator yang telah ditentukan berdasarkan kondisi desa tersebut. |

2.5.3 *Tools Bussines Process Management (BPM)*

Adapun *tools* yang digunakan pada saat menyusun manajemen bisnis prosesnya adalah *Diagram.net (Draw.io)* adalah aplikasi diagram online yang dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis diagram, seperti diagram alur, diagram organisasi, diagram UML, dan sebagainya. Aplikasi ini menyediakan integrasi dengan berbagai layanan cloud seperti *Google drive, OneDrive, dan Dropbox* sehingga memudahkan para pengguna dalam mengakses dan mengelola file yang ingin dibuat.

2.6 Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh individu yang berada di Desa Pallantikang yang akan diberikan pertanyaan berbeda seputar kesiapan digitalisasi desa untuk mengkonfirmasi hal yang sama. Adapun informan yang telah peneliti tentukan berdasarkan hasil observasi yaitu kepada kepala desa, kepala sekolah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai kantor desa, pegawai BUMDES.

2.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian. Adapun beberapa Teknik pengumpulan data, yaitu:

2.7.1 Studi Literatur

Studi literatur dapat dilakukan dengan mencari jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dan sumber-sumber elektronik lainnya yang membahas topik mengenai Digital *Village Index* (DVI), digitalisasi desa, dan pengembangan teknologi di wilayah pedesaan.

2.7.2 Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu tahap yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu Desa Pallantikang. Berikut adalah beberapa Teknik pengumpulan data lapangan yang dapat digunakan:

1. Observasi, melibatkan pengamatan langsung terhadap situasi, perilaku, dan lingkungan di Desa Pallantikang. Peneliti dapat mengamati infrastruktur digital yang ada, penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan sehari-hari, dan tingkat literasi digital di kalangan penduduk Desa Pallantikang.
2. Wawancara, teknik yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan sumber data dengan memberikan pertanyaan secara langsung yang diajukan oleh pewawancara kepada informan yang telah dipilih dan jawaban dari informan dicatat dan direkam menggunakan alat perekam seperti handphone.
3. Dokumentasi, pengumpulan data dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini seperti rencana pembangunan desa, catatan arsip, anggaran desa, dan dokumen yang berkaitan dengan digitalisasi, pengelolaan proses bisnis, atau program pemerintah terkait.

2.8 Olah dan analisis data

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih data yang penting, serta membuat Kesimpulan.

2.8.1 Transkrip wawancara

Transkrip wawancara merupakan proses yang dilakukan untuk mengubah rekaman audio dari wawancara ke dalam bentuk teks tertulis. Transkrip wawancara ini biasanya dilakukan dengan mendengar rekaman audio hasil wawancara secara teliti dan menuliskan kalimat-kalimat yang telah di ucapkan oleh informan. Berikut tahapan transkripsi wawancara pada penelitian ini.

2.8.2 Coding

Coding adalah tahapan data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan mengelompokkan atau merumuskan ulang informasi ke dalam kategori yang sesuai atau dengan memberikan label singkat. Kategori tersebut mencakup tema, konsep, atau masalah tertentu yang ada dalam wawancara. Tujuan dilakukan coding untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data untuk memahami makna dari informasi yang dikumpulkan. Berikut tahapan coding pada penelitian ini.

2.8.3 Triangulasi

Dalam memastikan keabsahan data dalam penelitian, diperlukan beberapa metode yang dapat digunakan salah satunya yaitu menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah metode pengumpulan informasi yang mengkombinasikan beragam data dan sumber yang telah tersedia.